

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu sunah dari beberapa sunatullah yang ditetapkan pada hamba-Nya<sup>1</sup> untuk mengatur hubungan suami istri yang baik, pernikahan juga media untuk menjaga kehormatan, keturunan serta kehidupan yang kekal, jika suami istri mau melaksanakan dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Adapun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diartikan suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqhan ghalidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Dalam melaksanakan undang-undang ini, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material, adapun tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera, artinya terciptanya hubungan lahir dan batin, sehingga timbul kebahagiaan dan kasih sayang antara anggota keluarga.

---

<sup>1</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Jilid 6 (Bandung : Al Ma'arif, 1980), h. 7.

<sup>2</sup> Kompilasi *Hukum Islam*, (Bandung : Fokus Media, 2005), h. 7.

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, h.3.

Di samping itu perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dengan melalui perkawinan akan mendapatkan anak serta mengemabngkan keturunan secara sah dan memenuhi naluri kebpakan dan keibuan yang dimiliki seseorang dalam rangka melimpahkan kasih sayangnya. Sebagai mana firman Allah dalam surat An Nahl ayat 72 :

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya : “ Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”(An Nahl 72)<sup>4</sup>

berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya untuk mengembangkan keturunan secara sah akan tetapi harus disertai dengan tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anaknya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.<sup>5</sup>

Pada dasarnya pemeliharaan anak (*hadhanah*) merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, namun dalam konsep Islam membedakan bahwa mengenai tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut, karena itu suami dan istri dalam memelihara anak dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa.

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : 1993), h. 412.

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998), cet. 3, h.

Sebagaimana dalam kompilasi hukum Islam pasal 98 ayat 1, menjelaskan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, namun bila terjadi perceraian suami istri, dan mempunyai anak yang belum mumayyiz (belum mengerti kemaslahatan dirinya)<sup>6</sup> maka istrilah yang berhak mendidik dan merawat anak itu, karena ia lebih berpengalaman dan lebih sabar dalam hal tersebut.<sup>7</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ابْنِي هَذَا  
 أَنَّنِ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَتَدْنِي لَهُ سِقَاءٌ وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي فَقَالَ  
 أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَنْكِحِي. (واخرج احمد وابو داود والبيهقي والحكم صحيحه)

Artinya : “Dari Abdullah bin Amr, bahwa seseorang perempuan bertanya : “Ya Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutku yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi pelindungnya dan rusukku yang menjadi minumannya tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambil dariku”. Maka sabda-nya “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kawin dengan orang lain”.<sup>8</sup> (HR. Ahmad Abdullah Baihaqi dan Hakim dan dia mensahkannya).

Hal itu sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq, bahwa jika terjadi perpisahan antara ibu dan ayah sedang mereka ini punya anak maka ibulah yang lebih berhak terhadap anak itu dari pada ayahnya selama tidak ada suatu alasan yang mencegah ibu melakukan pekerjaan hadhanah tersebut, atau karena anak telah mampu memilih apakah mau ikut ibu atau bapak.<sup>9</sup>

Atas dasar inilah bahwa ibulah yang lebih berhak untuk memelihara anaknya, selama ibunya itu tidak menikah lagi dengan laki-laki lain. Apabila ibunya menikah maka praktis hak hadhanah tersebut beralih kepada

<sup>6</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Al Gensindo, 1994), cet. 27, h. 423.

<sup>7</sup> Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta, Pustaka Al Khautsar, 1998), cet. 1, h. 454.

<sup>8</sup> Abu Dawud, *Sunah Abu Dawud*, (bairut, Libanon, Dar al Fukri, 1996), h. 252.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Op cit*, Jilid 8, h. 175.

ayahnya, sebab ibu anak tersebut menikah, maka besar kemungkinan perhatiannya akan beralih kepada suaminya yang baru, dan atau bahkan mengorbankan anak kandungnya sendiri.<sup>10</sup>

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 yang menyatakan bahwa : akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan member keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.<sup>11</sup>

Kaitannya dengan kewenangan pengadilan agama mengenai perkara hadhanah tersebut, telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 78 huruf (b) yang menyatakan bahwa : selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan pengugat pengadilan dapat (b) menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.

Hal ini pun telah dipertegas dalam KHI Pasal 156 huruf (a) dan (c) bahwa : (a) anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh wanita garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita harus lurus ke atas ayah, saudara perempuan dari ayah, dan (c) apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Op cit*, h. 251

<sup>11</sup> Subekti, et al, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta, Pradya Paramita, 2001), cet. 31, h. 549 – 550.

dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

Dengan adanya KHI ini yang merupakan penegasan ulang atas ketentuanketentuan UU Nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975, maka ketentuanketentuan UU tersebut akan terbawa ke dalam ruang lingkup yang bernafaskan syari'at Islam, dengan demikian dapat dikatakan selain tetap berpedoman pada UU Nomor 1 tahun 1974, kompilasi hukum Islam merupakan aturan dan hukum khusus yang akan diperlakukan secara khusus bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam.<sup>12</sup>

Fenomena yang terjadi dalam putusan-putusan Pengadilan dalam hal ini diantaranya dengan register perkara Nomor: 0482/Pdt.G/2013/PA.Tnk, perkara Nomor: 0679/Pdt.G/2014/PA.Tnk, perkara Nomor: 0780/Pdt.G/2014/PA.Tnk. Penetapan hak hadhanah yang diberikan kepada ayah atau ibu dari register, apakah sudah benar menurut aturan, logis atau tidak, apakah sudah didengar keterangan pihak-pihak yang menghendaki adanya permohonan hak hadhanah, keterangan pemohon dan termohon, apakah prosedur penerimaan perkara tersebut sudah benar, apakah pemeriksaan perkara permohonan hak hadhanah tersebut sesuai dengan alat bukti yang diajukan, apakah penyelesaian perkara tidak cacat hukum.

---

<sup>12</sup> Abdul Rahmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, (Malang, Bayu Media, 2003), h. 63.

Berawal dari latar belakang masalah inilah, penulis ingin mengetahui lebih mendalam mengenai persoalan ini dalam bentuk tesis yg berjudul “**Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak Hadhanah Pada Mantan Suami (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)**”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Belum ada hukum Islam yang memberikan kepastian hukum terhadap hak hadhanah.
- b. Putusan pengadilan dalam sengketa hadhanah masih menyisakan masalah.
- c. Cara hakim memproses sengketa hadhanah terlalu berpatokan kepada hukum materil dan formil.
- d. Putusan tanpa ijtihad dan jauh dari hati nurani.

### **2. Batasan Masalah**

Agar pembahasan dalam tulisan ini tidak keluar dari pokok permasalahan serta untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, perlu kiranya dilakukan pembatasan masalah;

- a. Belum ada hukum Islam yang memberikan kepastian hukum terhadap hak hadhanah.

- b. Putusan pengadilan dalam sengketa hadhanah masih menyisakan masalah.
- c. Cara hakim memproses sengketa hadhanah terlalu berpatokan kepada hukum materiil dan formil serta putusan tanpa ijtihad dan jauh dari hati nurani.

### **C. Rumusan masalah**

Berdasarkan keterangan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka penulis memfokuskan penelitian dengan membuat rumusan permasalahan yaitu : Bagaimana pertimbangan hakim dalam pelaksanaan putusan mengenai hadhanah pada mantan suami di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hadhanah.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi bidang hukum, khususnya mengenai pelaksanaan hadhanah setelah terjadinya perceraian. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan menambah wawasan ilmu hukum bidang perdata bagi masyarakat umum.

Manfaat yang terakhir dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi para praktisi Peradilan yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya, yaitu para Hakim khususnya di Tanjung Karang. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi atau bahan bacaan tambahan lagi bagi mahasiswa fakultas syariah maupun masyarakat luas.

#### **E. Kajian Pustaka**

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis terdapat hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan dan secara khusus di lingkungan Pascasarjana IAIN RI Lampung, penelitian mengenai “Putusan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Hadhanah (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)” belum pernah dilakukan penelitian pada topik dan permasalahan yang sama. Namun penulis dari beberapa sumber menemukan dari beberapa sumber menemukan beberapa karya ilmiah ataupun buku yang membahas tentang Putusan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Hadhanah sebagai berikut :

Dian Arian Nurrohmi dengan Tesis yang berjudul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggungjawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan (Hadhanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi). dalam tesisnya membahas mengenai Upaya apa yang dapat dilakukan seorang ibu jika tidak terpenuhinya



putusan pengadilan Agama Boyolali No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi yang mewajibkan ayah untuk membiayai pemeliharaan anak setelah perceraian.<sup>13</sup>

Abdul Rohman Budiono, dengan bukunya yang berjudul *Hukum Islam di Indonesia*, dalam buku ini diterangkan tentang hak antara suami dan istri yang seimbang dalam hukum, maka keduanya dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.<sup>14</sup>

Kemudian Ahmad Rofiq dalam bukunya, *Hukum Islam di Indonesia*, memaparkan bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, untuk itu dibutuhkan adanya kerja sama dan tolong-menolong antara suami istri dalam memelihara anak, dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa, namun jika terjadi perceraian, maka ibu mendapatkan prioritas utama untuk mengasuh anak selama anak tersebut belum mumayyiz, seperti yang dimaksud oleh pasal 105 kompilasi.<sup>15</sup>

Selanjutnya A. Muktiarto dalam bukunya *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, ia menjelaskan bahwa hal-hal yang melekat menjadi kewajiban suami yang merupakan hak istri di antaranya adalah pemberian biaya hadhanah bagi anak-anak yang belum dewasa, yang semuanya itu menurut ketentuan yang berlaku dan berdasarkan keputusan.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Dian Arian Nurrohmi dengan “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggungjawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan (Hadhanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi, Tesis tidak diterbitkan, Universitas Diponegoro, 2010.

<sup>14</sup> Abdul Rahmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, Malang, Bayu Media, 2003, h. 65.

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998, cet. 3, h. 250.

<sup>16</sup> A. Muktiarto, *Praktek-praktek Perkara pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, 2005. Cet. VI. h. 219.

Demikian pula Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah dalam bukunya, *Fiqih Wanita*, ia mengemukakan bahwa upah hadhanah sama seperti upah radha'ah (penyusuan), seorang ibu yang masih bersuami dengan bapak anak yang diasuhnya, maka ia tidak berhak mendapatkan upah dari sang suami, begitu juga dengan wanita yang sedang menjalani masa idadah karena ia masih mendapatkan nafkah dari keluarga (suami), sedangkan setelah selesai menjalani masa idah maka ia berhak mendapatkan upah sebagai mana ia berhak mendapatkan upah radha'ah (penyusuan).<sup>17</sup>

Begitu pula Sulaiman Rasyid dalam bukunya, *Fiqih Islam*, ia menjelaskan tentang syarat-syarat menjadi pendidik (hadin) bagi anak dan urutan yang berhak mempunyai hak hadhanah.<sup>18</sup>

Kemudian dalam buku *Ilmu Fiqih* yang ditulis oleh Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, dijelaskan bahwa hadhanah berbeda dengan tarbiyah, dalam hadhanah disamping terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani juga terkandung pengertian pendidikan bagi anak, dan masa hadhanah anak baik laki-laki maupun perempuan sampai mereka telah mencapai usia baligh.<sup>19</sup>

Selain buku-buku tersebut di atas sebenarnya masih banyak lagi buku-buku yang lain yang membahas mengenai seputar hadhanah. Penulis dalam mengadakan penelitian ini tidak sama dengan penelitian sebelumnya, fokus dalam melakukan penelitian ini penulis akan membahas mengenai “Putusan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Hadhanah (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang).

<sup>17</sup> Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta, Pustaka Al Khautsar, 1998, cet. 1, h. 455.

<sup>18</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Bandung, Sinar Baru Al Gensindo, 1994, cet. 27, h. 427.

<sup>19</sup> Departemen agama, *Ilmu Fiqih*, Jakarta, Dirjen Pembinaan Kelembagaan agama Islam, 1985. h. 217.

## F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam tulisan ini merupakan landasamn rasional cara pemecahan yang dirumuskan dan fokus penelitian mengenai putusan Pengadilan Agama dalam sengketa hadhanah. Berikut ini akan dijabarkan penegasan dari isi tesis ini,yaitu sebagai berikut.

Hukum Islam berupa Al-Qur'an, sunnah Nabi, dan syari'ah (Allah dan Rasulnya) telah menetapkan dan menunjukkan aturan-aturan yang beemuatan hukum untuk ditaati dan diikuti oleh manusia dalam menjelaskan praktek kehidupan. Melalui proses dan penelitian secara induktif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi, para ulama berkesimpulan bahwa hukum Islam itu diciptakaan dengan tujuan unuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia baik didunia maupun di akhirat.<sup>20</sup>

Salah satu kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memelihara anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang. Pemeliharaan itu bias bersifat formil maupun materil. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama antara suami istri, dan kewajiban tersebut tidak gugur meskipun keduanya telah putus perkawinan. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa :

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>20</sup> Abu Iskhah Asy-Syatibi, *al-Muwafadat fi ushul ahkam*, cet ke-2 (t.tp : Dar Al-Fikr,tt),h. 2-3.

Hadahanah secara bahasa berarti erat, secara istilah berarti memelihara, mengasuh, mendidik anak-anak yang masih kecil untuk menjaga kepentingannya dan melindunginya dari bahaya yang mengancamnya karena dia belum bias berdiri sendiri.<sup>21</sup> Firman Allah SWT :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٦١﴾

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Pada ayat di atas menjelaskan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.

Dalam surat Allah menjelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمَانَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui.

Pada ayat ini Allah menegaskan kepada orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan rasulnya dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu.

Islam mengajarkan untuk memandang anak sebagai perhiasan di dunia dan sebagai asset bagi generasi masa depan. Sebagaimana firman Allah :

<sup>21</sup> Supriatna, dkk., *Fiqih Munakahat II*, (Yogyakarta : Bidang Akademik, 2008), h. 80.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦١﴾

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Pada ayat di atas orangtua diperintahkan Allah SWT memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar anggota keluarganya itu melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya.<sup>22</sup> Karena akan termasuk dalam lingkungan keluarga, maka orangtua atau kerabat juga berkewajiban mendidiknya menjadi orang yang beragama agar kelak dia dapat terhindar dari siksaan api neraka.<sup>23</sup>

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggungjawab serta beban kedua orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau perkawinan mereka gagal karena perceraian. Arti penting tanggungjawab tersebut tertuang dalam penjelasan sebagai berikut :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan member keputusan.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat member kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 158

<sup>23</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Dina Utama, 1993), h. 120

<sup>24</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (a)(b)(c)

Dalam hal ini perlu ditegaskan, bahwa terdapat perbedaan tanggungjawab pemeliharaan yang bersifat material, dan tanggungjawab pengasuhan terhadap anak. Jika ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan tersebut lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggungjawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu, namun disisi lain apabila terjadi bahwa suami tidak mampu, pengadilan dapat menentukan lain.<sup>25</sup>

Beranjak dari pertimbangan kasih sayang dan tanggungjawab tersebut, penelitian ini berdasarkan kepada pemikiran bahwa hadhanah setelah terjadi perceraian tetap menjadi hak kedua orangtuanya, yaitu mantan suami dan istei dan mantan isteri, tidak menutup kemungkinan pasangan suami dan isteri sama-sama bekerja. Sehingga waktu luang yang dimilikipun tidak jauh berbeda. Kemudian bagaimana perlindungan anaknya jika keadaan seperti itulah yang terdapat kepada dua mantan pasangan suami isteri yang menjadi para pihak dalam putusan yang diteliti dalam tesis ini.

Selain itu, hak anak terhadap orangtuanya adalah anak mendapat pendidikan, baik menulis, maupun membaca, pendidikan keterampilan dan mendapatkan rezeki yang halal. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan sebagai berikut :

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-4, (Jakarta : Raja Grafindo persada, 1998), h.248.

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4

Kekuasaan orang tua dapat dicabut atau dialihkan apabila adanya alasan-alasan yang menuntut pengadilan tersebut. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa :

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :
  - a. Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya ;
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk member pemeliharaan terhadap anak tersebut.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam juga diatur masalah hadhanah. Yakni dalam pasal 156 huruf (a) (b) dan (c) disebutkan.

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh :
  1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
  2. Ayah
  3. Wanita-wanita dari garis lurus ke atas dari ayah
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah ataupun ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

Senada dengan hal tersebut di atas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga mengatakan bahwa :

1. Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 30



Bagi seorang hakim, wali, bekas suami atau wajib berhati-hati dalam memberi keputusan atau berusaha memisahkan seorang ibu dengan anaknya, mengingat petunjuk Rasulullah dalam hadis di atas. Jika ibu tidak ada, yang berhak menjadi pemelihara adalah ibu dari ibu dan seterusnya keatas, kemudian ibu dari bapak dan seterusnya.

Dalam hal perkawinan sekalipun ketika terjadi perceraian, kedua orang tuanya berkewajiban untuk menjaga, mengasuh, bahkan mendidik mereka baik itu dengan cara memberikan pelajaran disekolah maupun sebagainya, hingga anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa. Sejalan dengan hal tersebut, maka tujuan disyariatkannya hak hadhanah adalah untuk kesejahteraan anak tersebut. Agar dapat lebih memahami maksud dari tesis ini maka penulis gambarkan skema sederhana dalam kerangka fikir di bawah ini :



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG



Gambar 1  
Kerangka Pikir

